



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2026**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau 78512

Alamat Website : [www.sanggau.go.id](http://www.sanggau.go.id) Email : [bpkad@sanggau.go.id](mailto:bpkad@sanggau.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025. Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan serta mengevaluasi strategi yang telah ditentukan apakah dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing bidang, namun tetap diupayakan secara maksimal agar dapat teratasi dengan pendekatan koordinasi dan asistensi yang bersifat persuasif. Kami menyadari Laporan Kinerja Tahunan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan Laporan Kinerja Tahunan ini di tahun-tahun mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Tahunan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Sanggau, 09 Februari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sanggau



**SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671126 199503 2 004

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini menekankan pada analisis di tataran hasil (*outcome*) daripada keluaran (*output*). Hal ini dimaksudkan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja utama sesuai Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau telah memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.
2. Target kinerja pada sasaran strategis I dengan IKU Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) telah mencapai target kinerja yaitu 100% sehingga mendukung indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau yaitu memperoleh opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Target kinerja pada sasaran strategis I dengan IKU Persentase Nilai Aset Tetap (%) perlu dilakukan penyesuaian dengan target kinerja Provinsi dan Nasional.
4. Nilai AKIP BPKAD meningkat dari tahun ketahun yang menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan terus berupaya menyesuaikan diri dengan arus perkembangan pada era teknologi informasi pada sistem administrasi pemerintahan yang tidak bisa dihindari dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan utamanya secara kelembagaan proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban serta penatausahaan Barang Milik Daerah ke depannya dapat berjalan

secara tertib, transparan, akuntabel serta tepat waktu dibantu dengan aplikasi dan sistem yang memadai dan handal.

Dalam Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 sebesar Rp275.469.776.595,22 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp241.153.338.799,63 atau sebesar 87,54%.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi .....	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	4
5. Sumber Daya Keuangan .....	6
6. Sarana dan Prasarana .....	6
<b>B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....</b>	<b>10</b>
1. Visi .....	10
2. Misi .....	11
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	11
<b>B. PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>39</b>

### Lampiran

- Formulir Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap OPD wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik/ instansi atas pencapaian kinerja, visi, misi, dan tujuan strategis instansi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi sarana transparansi, evaluasi objektif, dan alat ukur keberhasilan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta keberhasilan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintahan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Sanggau nomor 20 tahun 2021 perubahan atas peraturan Bupati nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
- e) Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 20 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a) **KEPALA BADAN**

b) **SEKRETARIAT**

Sekretariat, membawahi 2 (Dua) Sub Bagian, yaitu:

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja

c) **BIDANG PEMBIAYAAN**

Bidang Pembiayaan , membawahi 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Anggaran
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan

d) **BIDANG AKUNTANSI**

Bidang Akuntansi, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah
- 2) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

e) **BIDANG ASET DAERAH**

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset; dan
- 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset

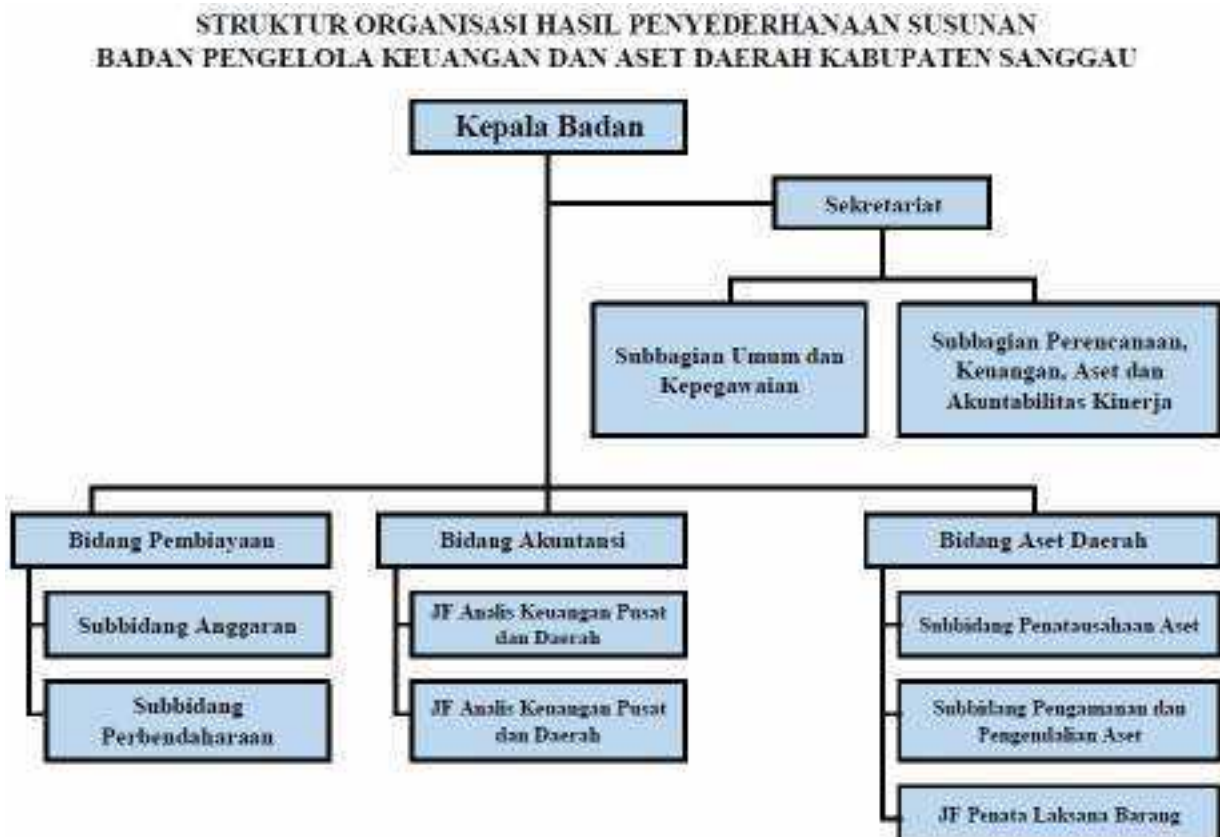
f) **UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

Formasi untuk Unit Pelaksanan Teknis Badan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau belum ada penetapan dari Bupati Sanggau.

g) **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Formasi untuk Jabatan Fungsional di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau belum ada penetapan dari Bupati Sanggau.

Bagan struktur Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai berikut:



### 3. Tupoksi

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- e) Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau didukung jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 64 orang yang terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan status kepegawaian dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	1 Orang	23 Orang	5 Orang	29 Orang
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	1 Orang	4 Orang	-	5 Orang
	TOTAL	-	2 Orang	27 Orang	5 Orang	34 Orang

Tabel 2

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Gol IX	Gol VII	Gol V	Jumlah
1	PPPK	9 Orang	2 Orang	19 Orang	30 Orang
	TOTAL	9 Orang	2 Orang	19 Orang	30 Orang

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

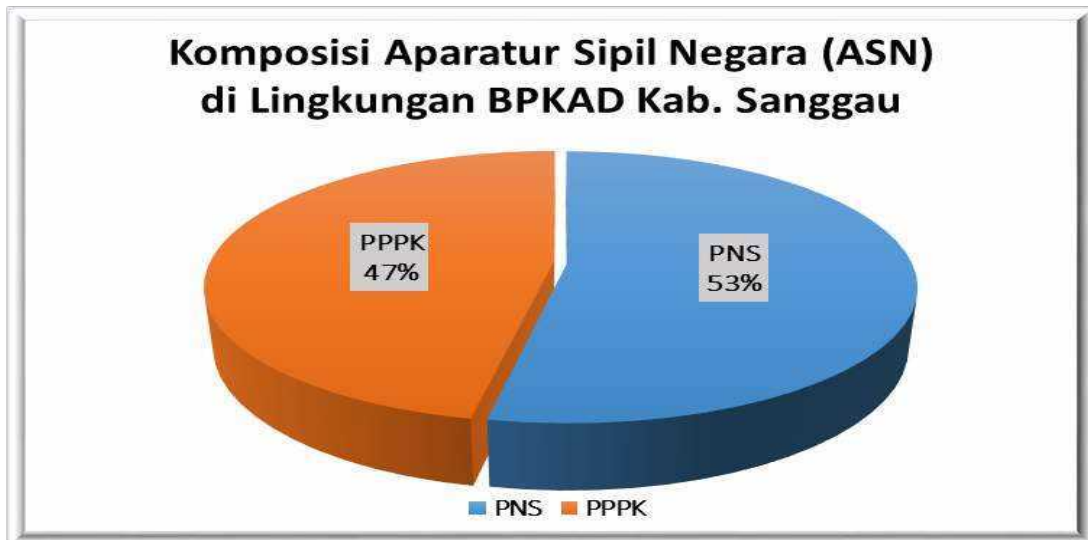
No	Jenis Kelamin	SMA	DIII	DIV	S1	S2	Jumlah
1	Laki-Laki	2 Orang	1 Orang	-	12 Orang	4 Orang	19 Orang
2	Perempuan	6 Orang	2 Orang	-	4 Orang	3 Orang	15 Orang
	TOTAL	8 Orang	3 Orang	-	16 Orang	7 Orang	34 Orang

Tabel 4

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	SMA	DIII	DIV	S1	S2	Jumlah
1	Laki-Laki	10 Orang	2 Orang	-	2 Orang	-	14 Orang
2	Perempuan	6 Orang	1 Orang	-	9 Orang	-	16 Orang
	TOTAL	16 Orang	3 Orang	-	11 Orang	-	30 Orang

Dengan keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 34 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 30 orang memiliki rasio perbandingan yang digambarkan sebagai berikut:



## 5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2025 bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Sanggau yang terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ditetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp275.469.776.595,22.

## 6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam menunjang pelaksanaan tugas terdiri dari:

- a) Peralatan dan mesin yang terdiri dari:
  - Alat kantor (tong sampah stensil bulat dan tong sampah three in one)
  - Alat Rumah Tangga seperti mebeleur (rak piring kaca), alat pendingin (AC 2 PK dan AC 1 PK), dan alat rumah tangga lainnya (dispenser, karpet, umbul-umbul).
  - Komputer/ Personal Komputer (PC unit, laptop), peralatan komputer main frame (UPS), peralatan mini komputer (printer), peralatan personal komputer (printer, scanner).

- Meja dan kursi kerja/ rapat pejabat terdiri dari Meja kerja pejabat (meja kerja pejabat eselon IV), kursi kerja pejabat (Kursi kerja pejabat eselon III), kursi tamu di ruang pejabat (kursi tamu di ruang tunggu pejabat eselon II), lemari dan arsip pejabat (lemari arsip untuk arsip dinamis).
- b) Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan gedung tempat kerja.
- c) Jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari instalasi gardu listrik distribusi (instalasi gardu distribusi kapasitas sedang).
- d) Aset lain-lain (aset tak berwujud).

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang.

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka panjang.

Dalam mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang dihadiri oleh kepala-kepala subbidang dan subbagian dipimpin oleh kepala badan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini baik dari lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mekanisme/sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan sudah tertata dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu yaitu SIPD RI sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien namun masih sering terjadi *error system* yang melibatkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri. Pemerintah Daerah harus melaporkan kendala secara resmi ke Pusdatin Kemendagri sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh solusi yang menyebabkan pencatatan dan realisasi anggaran tertunda;
- Perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) agar dapat mengikuti perkembangan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang sering berubah dengan cepat sehingga tidak mempengaruhi proses realisasi penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan OPD.

2. Lingkup Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dengan menggunakan SIPD RI masih memerlukan asistensi dan pendampingan dari Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
- Perhitungan Neraca Aset masih memerlukan validasi oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan antara perhitungan manual (kertas kerja) yang disusun oleh Pengurus Barang SKPD dengan sistem pada aplikasi SIMBADA yang dikelola oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

3. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah:

- Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) belum terintegrasi pada SIPD RI dan masih menggunakan aplikasi SIMBADA sehingga belum berjalan optimal dalam upaya mempercepat proses penyusunan laporan keuangan SKPD dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpadu;
- Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) agar laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dapat tepat waktu, transparan dan akuntabel.

3. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah

- Pengelolaan Aset dan Barang Milik daerah (BMD) belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan system informasi pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil cukup tinggi;
- Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat masih relatif kecil disebabkan kurang didukung data yang otentik terhadap kepemilikan tanah aset daerah, sehingga perlu penelusuran dan identifikasi aset sebelum proses sertifikasi ke Badan Pertahanan Nasional terkait status hukumnya;
- Pemanfaatan aset daerah belum optimal dalam rangka memberikan manfaat ekonomis dan penambahan bagi Pendapatan Asli Daerah;
- Percepatan proses sertifikasi atas kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui kerja sama dengan membuat MoU antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan pihak Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau;
- Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah terhadap tanah dan bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama yang menunjukkan kepemilikan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Sanggau.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

#### 1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang keuangan dimana dalam melaksanakan fungsinya membutuhkan tujuan sebagai dasar pijakan untuk mencapai target kinerja. Melalui rumusan tujuan beserta indikatornya maka harapannya target kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terukur dengan memenuhi unsur prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sejalan dengan Visi Kabupaten Sanggau yaitu **“Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan”**.

Untuk mewujudkan Visi yang dimaksud merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai bentuk nyata diri dari visi tersebut maka ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan.

## 2. Misi

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menggambarkan arah ke mana organisasi akan dibawa. Misi harus dirumuskan dengan memperhatikan visi, sehingga tergambar apa sebenarnya yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau melaksanakan Misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional”**.

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Adapun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang berpedoman pada sasaran Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan jangka panjang menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut **“Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah

ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2025	Target Akhir 2025
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%
		Persentase Nilai Aset Tetap	70%	70%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	70	70

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dimana rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan ditetapkan.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun Anggaran 2025 serta Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan Bupati Sanggau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Kondisi Awal 2025</b>	<b>Target Akhir 2025</b>
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%
		Persentase Nilai Aset Tetap	70%	70%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	70	70

Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dicapai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai. Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program/kegiatan Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauh mana capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil penilaian tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana capaian nilai kinerja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

#### KRITERIA PENILAIAN KINERJA

<b>NO</b>	<b>Interval Capaian kinerja</b>	<b>Interprestasi</b>	<b>Kode</b>
<b>1</b>	≥ 91	Sangat Tinggi	ST
<b>2</b>	≥ 76 - 90,99	Tinggi	T
<b>3</b>	≥ 66 - 75,99	Sedang	S
<b>4</b>	≥ 51 - 65,99	Rendah	R
<b>5</b>	≥ 50,99	Sangat Rendah	SR

Adapun perhitungan persentase capaian kinerja diukur dalam formulir pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan antara realisasi dan target dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}}$$

#### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang di harapkan (target).

Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Barat tahun 2025 yang disajikan sebagai berikut:

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	101,95%	101,95%
		Persentase Nilai Aset Tetap (%)	70%	70%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	70	70	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100,49%</b>

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebesar 100,49% sehingga dapat dikatakan berhasil dengan predikat evaluasi capaian kinerja **“Sangat memuaskan”**. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berhasil dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dengan penyerapan anggaran yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pencapaian indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis I</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah</b>
<b>IKU I</b>	<b>Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)</b>

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja utama pertama yaitu Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%) adalah Program Pengelolaan keuangan daerah, kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan:

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Adapun target dan realisasi indikator kinerja program yang mendukung tercapainya sasaran pertama dan IKU pertama adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	85	85,70	100,82%
		Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100	100	100%
		Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu	100	100	100%
		Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemda	100	100	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100,21%</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja program terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Persentase penyerapan belanja daerah terealisasi melebihi target yang telah ditentukan sementara indikator kinerja program lainnya memenuhi target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada indikator kinerja program yang memenuhi IKU I dalam rangka tercapainya sasaran strategis I sebesar 100,21% sehingga dapat dikategorikan berhasil dengan predikat “**Sangat Memuaskan**”. Kondisi pencapaian indikator kinerja program ini sangat mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran daerah yaitu opini pemeriksaan BPK dengan target WTP pada tahun 2025. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting seluruh

OPD di Kabupaten Sanggau dalam rangka pencapaian indikator sasaran daerah melalui program pengelolaan keuangan daerah.

<b>Sasaran Strategis I</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah</b>
<b>IKU II</b>	<b>Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)</b>

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja utama kedua yaitu Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) adalah Program Pengelolaan keuangan daerah, kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan:

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- h. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- i. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- j. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- l. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Adapun target dan realisasi indikator kinerja program yang mendukung tercapainya sasaran pertama dan IKU kedua yaitu Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	Penyusunan APBD tepat waktu	100	100	100%
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	294	294	100%
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	10.300	13.364	129,75%
		Persentase realisasi transfer pemerintah pusat	100	87	87%
		Persentase realisasi transfer pemerintah provinsi	100	93	93%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>101,95%</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja program terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada indikator kinerja program yang memenuhi IKU II dalam rangka tercapainya sasaran strategis I sebesar 101,95% sehingga dapat dikategorikan berhasil dengan predikat “**Sangat Memuaskan**”. Indikator kinerja program yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya IKU Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sanggau adalah penyusunan APBD tepat waktu. Dalam tahun 2025, realisasi pencapaian indikator kinerja program ini menunjukkan hasil yang maksimal karena APBD dapat disusun tepat waktu sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan hal positif karena program/kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Indikator kinerja program ini sangat mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran daerah dalam rangka memenuhi nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai target yang telah ditentukan.

<b>Sasaran Strategis I</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah</b>
<b>IKU III</b>	<b>Persentase Nilai Aset Tetap (%)</b>

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja utama ketiga yaitu Persentase Nilai Aset Tetap (%) adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Adapun target dan realisasi indikator kinerja program yang mendukung tercapainya sasaran pertama dan IKU ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
<b>1.</b>	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	Persentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	75	75	100%
		Persentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	90	90	100%
		Persentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2025	75	75	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	100	100	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPBMD) tepat waktu	100	100	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu	100	100	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja program terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada indikator kinerja program yang memenuhi IKU III dalam rangka tercapainya sasaran strategis I sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan berhasil dengan predikat “**Sangat Memuaskan**”. Seluruh indikator kinerja program terlaksana dengan baik sehingga mendukung pencapaian IKU III yaitu persentase nilai aset tetap. Peningkatan persentase nilai aset tetap menargetkan peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah dalam menginventarisir dan mengelola aset daerah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sanggau.

<b>Sasaran Strategis II</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD</b>
<b>IKU IV</b>	<b>Nilai AKIP BPKAD</b>

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja utama empat yaitu Nilai AKIP BPKAD adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun target dan realisasi indikator kinerja program yang mendukung tercapainya sasaran kedua dan IKU keempat adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	70	Dalam proses penilaian	-
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat selaku APIP melakukan evaluasi atas implementasi AKIP atau evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah setiap tahunnya. Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2024, hasil evaluasi AKIP pada BPKAD memperoleh nilai 68,20 atau predikat B (Baik) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja BPKAD sudah baik, namun masih perlu sedikit perbaikan. Sementara hasil evaluasi AKIP untuk tahun 2025 masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat dimana Laporan Hasil Evaluasi Impelentasi AKIP disampaikan pada awal triwulan ke III setiap tahunnya. Komponen/ subkomponen/ Kriteria yang menjadi aspek penilaian adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

a. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	265,173,270,977.42	232,308,191,029.63	87,61%	100%	12,39%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,502,734,414.95	1,421,510,838.00	94,59%	100%	5,41%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,793,771,202.85	7,423,636,932.00	84,42%	100%	15,58%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>275,469,776,595.22</b>	<b>241,153,338,799.63</b>	<b>87,54%</b>	<b>100%</b>	<b>11,13%</b>

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebesar 11,13% yang menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sudah optimal, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dianggarkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Menunjang/ Tidak Menunjang</b>
<b>Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah</b>	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	Menunjang
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	100%	Menunjang
	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	100%	Menunjang
	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	100%	Menunjang	

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Menunjang/ Tidak Menunjang</b>
	Persentase Nilai Aset Tetap	70%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%)	100%	Menunjang
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah (tertib administrasi dan fisik)	100%	Menunjang
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD</b>	Nilai AKIP BPKAD	70%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh program yang dilaksanakan di BPKAD menunjang tercapainya tujuan dan sasaran kinerja BPKAD.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2021-2025)

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Target 2026</b>
<b>Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah</b>	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Nilai Aset Tetap	66%	67%	68%	69%	70%	71%
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD</b>	Nilai AKIP BPKAD	66	67	68	69	70	71

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2021-2025 memiliki kinerja yang stabil dan mampu mencapai target realisasi yang telah ditentukan. Realisasi sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada IKU Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%) dan IKU Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) tahun 2021-2025 mencapai target maksimal setiap tahunnya yaitu 100%,

sementara IKU Persentase Nilai Aset Tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, realisasi sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD dengan IKU Nilai AKIP BPKAD mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2026
			2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%	100%	100%
		Persentase Nilai Aset Tetap	68%	69%	70%	71%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	68	69	70	71

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing sasaran strategis sudah memenuhi target RPJMD untuk tahun 2025. Realisasi sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah pada IKU Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%) dan IKU Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) tahun 2023-2025 mencapai target maksimal setiap tahunnya yaitu 100%, sementara IKU Persentase Nilai Aset Tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 67% pada tahun 2023, 68% pada tahun 2024 dan 69% pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD dengan IKU Nilai AKIP BPKAD mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 67% pada tahun 2023, 68% pada tahun 2024 dan 69% pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meningkat dari tahun ke tahun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi dan target Nasional

No	Sasaran	IKU	Realisasi 2025	Target Provinsi	Target Nasional
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%	100%
		Persentase Nilai Aset Tetap	69%	97%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	B	A	A

Berdasarkan tabel diatas, realisasi sasaran Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah IKU Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%) dan Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) pada BPKAD Kabupaten sanggau sama dengan target provinsi dan nasional yaitu 100%. Sementara untuk realisasi sasaran Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah IKU Persentase Nilai Aset Tetap sebesar 69% dengan target provinsi 97% dan target nasional 100%. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan target dan realisasi dalam pengelolaan aset tepat agar dapat memaksimalkan tercapainya sasaran BPKAD dan sasaran Kabupaten Sanggau. Realisasi sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD dengan IKU Nilai AKIP BPKAD adalah B sementara untuk target provinsi yaitu A dan target Nasional yaitu A.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mencapai strategis tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dijabarkan sebagai berikut.

Hambatan pada sasaran strategis ini adalah:

- a. Beberapa aset/barang milik daerah belum terdokumentasi dengan baik sehingga penatausahaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengamanan aset belum optimal.
- b. Usulan pemindahtanganan atau pemusnahan barang inventaris belum dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing OPD.
- c. Aplikasi pengelolaan BMD belum terintegrasi pada sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan dalam SIPD RI.
- d. Aset Kabupaten Sanggau tersebar hingga ke pelosok yang menyebabkan fungsi pengawasan menjadi terbatas.

Solusi atas Hambatan tersebut adalah:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi aset atau pendampingan terhadap pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu secara rutin dalam rangka inventarisasi aset di lapangan.
- b. Melakukan pendampingan bagi pengurus barang dalam menatausahakan BMD dan inputan dalam Aplikasi SIMBADA.
- c. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- d. Membangun komunikasi yang efektif dengan stakeholder yang terkait dalam rangka sinkronisasi peraturan Perundang-undangan khususnya dalam optimalisasi kerjasama pemanfaatan BMD.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan aset daerah secara optimal sehingga menjadi yang lebih baik.
- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi aset di lapangan, melakukan upaya-upaya peningkatan pengamanan terhadap barang milik daerah terutama tanah yang belum memiliki status hukum (sertifikat).
- g. Secara berkesinambungan melakukan upaya pengawasan aset yang masih dalam penggunaan pihak ketiga melalui pendataan di lapangan, rapat koordinasi dan pemasangan papan plang di lokasi barang milik daerah tersebut.
- h. Memaksimalkan penggunaan SIPD RI dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebesar **Rp241.153.338.799,63** atau **87,54%** dari anggaran belanja sebesar **Rp275.469.776.595,22**. Belanja pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>8.793.771.202,85</b>	<b>7.423.636.932,00</b>	<b>84,42%</b>
5.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>88.032.414,00</b>	<b>85.494.442,00</b>	<b>97,12%</b>
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.634.733,00	12.381.384,00	97,99%
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.220.889,00	11.533.290,00	94,37%
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.690.480,00	12.150.726,00	95,75%
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.467.352,00	12.318.412,00	98,81%
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.081.865,00	11.796.525,00	97,64%
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.420.503,00	12.145.065,00	97,78%
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.516.592,00	13.169.040,00	97,43%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>5.478.666.147,00</b>	<b>4.448.315.910,00</b>	<b>81,19%</b>
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.012.439.049,00	2.248.123.614,00	74,63%
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.446.340.077,00	1.338.676.837,00	92,56%
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	922.763.116,00	766.536.463,00	83,07%
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.670.446,00	21.866.889,00	96,46%
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	41.414.876,00	40.565.434,00	97,95%
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.038.583,00	32.546.673,00	98,51%
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>212.734.276,00</b>	<b>194.104.125,00</b>	<b>91,24%</b>
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.686.103,00	16.490.965,00	98,83%
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.131.368,00	73.524.457,00	97,86%
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	120.916.805,00	104.088.703,00	86,08%
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.182.503.340,00</b>	<b>1.157.804.530,00</b>	<b>97,91%</b>
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.263.160,00	128.222.149,00	96,94%
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432.657.910,00	415.478.462,00	96,03%
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	162.002.280,00	160.455.273,00	99,05%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.159.421,00	18,000,000,00	93,95%
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.898,000,00	305.401.781,00	99,84%
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	130.522.569,00	130.246.865,00	99,79%
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>515.413.196.55</b>	<b>495.600.190,00</b>	<b>96,16%</b>
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.413.196.55	495.600.190,00	96,16%
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>944.627.692.30</b>	<b>702.563.793,00</b>	<b>74,37%</b>
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.046.580,00	39.886.026,00	99,60%
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	661.368.333,00	430.098.038,00	65,03%
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.212.779.30	232.579.729,00	95,63%
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>371.794.137,00</b>	<b>339.753.942,00</b>	<b>91,38%</b>
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	231.671.756,00	201.198.998,00	86,85%
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.122.381,00	138.554.944,00	98,88%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>265.173.270.977,42</b>	<b>232.308.191.029,63</b>	<b>87,61%</b>
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.450.513.521,50</b>	<b>1.398.249.599,00</b>	<b>96,40%</b>
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.445.427,35	95.032.617,00	99,57%
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.845.027,35	95.294.273,00	99,43%
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	64.546.315,00	58.516.500,00	90,66%
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	38.604.076,00	38.120.422,00	98,75%
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	39.529.150,00	38.122.210,00	96,44%
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	571.135.526,15	551.817.481,00	96,62%
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	545.407.999,65	521.346.096,00	95,59%
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.471.790.507,70</b>	<b>1.432.989.628,00</b>	<b>97,36%</b>
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	434.351.857,00	432.925.512,00	99,67%
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	96.782.635,00	96.589.084,00	99,80%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi. Fasilitas. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	303.387.644,70	270.889.377,00	89,29%
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	392.738.065,00	389.595.345,00	99,20%
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	244.530.306,00	242.990.310,00	99,37%
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.458.621.345,50</b>	<b>1.443.901.263,00</b>	<b>98,99%</b>
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	185.581.582,50	182.615.223,00	98,40%
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	200.053.461,00	197.086.049,00	98,52%
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran	197.345.121,00	192.819.915,00	97,71%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	515.871.460,00	513.728.026,00	99,58%
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	300.480.125,00	299.456.375,00	99,66%
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20.621.324,00	19.791.400,00	95,98%
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	38.668.272,00	38.404.275,00	99,32%
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>260.792.345.602,72</b>	<b>228.033.050.539,63</b>	<b>87,44%</b>
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	11.011.533,00	11.011.533,00	100,00%
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	255.137.945.183,50	226.519.084.767,63	88,78%
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.643.388.886,22	1.502.954.239,00	26,63%
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.502.734.414,95</b>	<b>1.421.510.838,00</b>	<b>94,59%</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.502.734.414,95</b>	<b>1.421.510.838,00</b>	<b>94,59%</b>
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	106.748.272,20	104.669.601,00	98,05%
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.069.968,00	18.863.684,00	98,92%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	72.534.668,00	71.296.146,00	98,29%
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.989.610,00	50.513.998,00	99,07%
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	516.902.980,20	458.292.684,00	88,66%
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	156.039.826,55	153.768.485,00	98,54%
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	126.995.699,00	122.181.604,00	96,21%
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	92.981.568,00	90.067.480,00	96,87%
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.390.250,00	28.424.774,00	93,53%
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	219.370.831,00	214.012.235,00	97,56%
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34.448.690,00	33.975.737,00	98,63%
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38.712.740,00	38.109.118,00	98,44%
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	37.549.312,00	37.335.292,00	99,43%
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>		<b>4.458.779.126,00</b>	<b>3.586.800.451,00</b>	<b>80,44%</b>
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>10.192.820.256,35</b>	<b>9.503.390.501,00</b>	<b>93,24%</b>
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>163.606.357,65</b>	<b>161.509.800,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jumlah Tak Terduga</b>		<b>5.627.871.515,22</b>	<b>1.490.463.564,00</b>	<b>26,48%</b>
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		<b>255.026.699.340,00</b>	<b>226.411.174.483,63</b>	<b>88,78%</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>275.469.776.595,22</b>	<b>241.153.338.799,63</b>	<b>87,54%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

Didalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan, Badan Pengelola Keuangan akan terus berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sebaik mungkin. Hal ini sebagai wujud nyata dan komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi salah satu instansi Pemerintah Daerah yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja utama sesuai Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau telah memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.
2. Target kinerja pada sasaran strategis I dengan IKU Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) telah mencapai target kinerja yaitu 100% sehingga mendukung indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau yaitu memperoleh opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Target kinerja pada sasaran strategis I dengan IKU Persentase Nilai Aset Tetap (%) perlu dilakukan penyesuaian dengan target kinerja Provinsi dan Nasional.
4. Nilai AKIP BPKAD meningkat dari tahun ketahun yang menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi fokus dan perhatian bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lebih baik lagi kedepannya, yaitu:

1. Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan kegiatan inventarisasi, monitoring dan menemukan solusi untuk setiap permasalahan pada aset daerah meliputi aset tanah, bangunan dan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Mengoptimalkan pengamanan aset daerah melalui pengurusan sertifikat tanah/ aset daerah yang belum memiliki bukti legal.
4. Meningkatkan pembinaan pada OPD dalam rangka penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran penatausahaan dan pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja SKPD Tahun 2025 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2025.

Sanggau, 19 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



**SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM**

Pembina Utama Muda

NIP 19671126 199503 2 004

## CAPAIAN KINERJA 2025 DAN PENETAPAN KINERJA 2026

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sasaran 1 : Tersusunnya Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah</b>	%			
<b>a.</b>	Indikator Sasaran 1: Penyusunan APBD tepat waktu	%	100	100	100
<b>b.</b>	Indikator Sasaran 2: Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	Dokumen	540	294	294
<b>c.</b>	Indikator Sasaran 3: Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	Dokumen	10.300	13.364	13.364
<b>d.</b>	Indikator Sasaran 4: Persentase realisasi transfer Pemerintah Pusat	%	100	87	100
<b>e.</b>	Indikator Sasaran 5: Persentase realisasi transfer Pemerintah Provinsi	%	100	93	100
<b>2.</b>	<b>Sasaran 2: Tersedianya Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu</b>	%			
<b>a.</b>	Indikator Sasaran 1: Prosentase penyerapan belanja daerah	%	85	85	85
<b>b.</b>	Indikator Sasaran 2: Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100
<b>c.</b>	Indikator Sasaran 3: Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ Penerimaan tepat waktu	%	100	100	100
<b>d.</b>	Indikator Sasaran 4: Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Sasaran 3: Tertib dan Terturnya Administrasi dan Penggunaan Barang Milik Daerah</b>	%			
<b>a.</b>	Indikator Sasaran 1: Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir secara baik	%	75	75	80
<b>b.</b>	Indikator Sasaran 2: Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan Daerah	%	90	90	90
<b>c.</b>	Indikator Sasaran 3: Prosentase kenaikan nilai aset daerah Tahun 2025	%	75	75	75
<b>d.</b>	Indikator Sasaran 4: Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	%	100	100	100
<b>e.</b>	Indikator Sasaran 5: Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPBMMD) tepat waktu	%	100	100	100
<b>f.</b>	Indikator Sasaran 6: Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu	%	100	100	100